

**ANALISIS PENYERAPAN REALISASI ANGGARAN
SETELAH PENERAPAN SIMDA NG
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN DEMAK**

**Laporan *Bussines Cases Report*
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S1 Akuntansi**

Program Studi Akuntansi



**Disusun Oleh :
RINA FAUZIZAH
Nim : 31401900140**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PENYERAPAN REALISASI ANGGARAN
SETELAH PENERAPAN SIMDA NG
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN DEMAK**

**Disusun Oleh :
RINA FAUZIZAH
Nim : 31401900140**

Telah di setujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan sidang panitia *Business Cases Report Magang MB-KM* Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 16 Januari 2023

Pembimbing,

Dosen Pembimbing Lapangan,

Dosen Supervisor



Naila Najihah, S.E., M.Sc
NIK : 211418029



Umar Surya Alamtyas, SE, MM
NIP : 197612222006042016

BUSSINES CASES REPORT MAGANG MBKM
ANALISIS PENYERAPAN REALISASI ANGGARAN
SETELAH PENERAPAN SIMDA NG
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN DEMAK

Disusun Oleh :
Rina Fauzizah
NIM : 31401900140

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 02 Februari 2023

Susunan Dewan Penguji
Dosen Pembimbing Lapangan



Naila Najihah, SE., M.Sc
NIK. 211418029

Dosen Penguji I

Dosen Penguji II



Drs. Osmad Muthafer, M.Si
NIK. 210403050



Dedi Rusdi, SE., M.Si., Akt., CA
NIK. 2114960006

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
Semarang, 02 Februari 2023

Ketua Program Studi Akuntansi



Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., Ca
NIK. 211403012

PERNYATAAN LAPORAN MAGANG

Nama : RINA FAUZIZAH

Nim : 31401900140

Prodi : S1 Akuntansi

Jurusan : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa usulan laporan *Business Cases Report* berjudul “**Analisis Penyerapan Realisasi Anggaran Setelah Penerapan SIMDA NG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi atau duplikasi dari hasil karya orang lain. Pendapat orang lain yang terdapat dalam laporan magang ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti laporan magang ini adalah hasil plagiasi dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 02 Februari 2023

Yang Menyatakan,



Rina Fauzizah

NIM. 31401900140

ABSTRACT

This study describes the analysis of the absorption of budget realization after the implementation of SIMDA NG at the Departement of Public Work and Spatial Planning (DINPTARU) in Demak Regency. The purpose of this study is to analyze the impact of changes from the Regional Management Information System (SIMDA) to the Next Generation Regional Management Information System (SIMDA NG) in influencing the process of absorption of budget realization at the Departement of Public Work and Spatial Planning (DINPTARU) in Demak Regency. This research was conducted using a qualitative descriptive analysis method with data collection through interview and documentation. The result of this study were to find a problem related to the renewal and implementation of information systems at the Departement of Public Work and Spatial Planning (DINPTARU) in Demak Regency, which led to a non-maximum absorption of budgeted realization in capital expenditures in the first year.

Keyword : Absorption, Budget Realization, SIMDA NG

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan mengenai analisis penyerapan realisasi anggaran setelah penerapan SIMDA NG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui analisis dampak perubahan dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) menjadi Sistem Informasi Manajemen Daerah *Next Generation* (SIMDA NG) dalam mempengaruhi proses penyerapan realisasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DINPUTARU) Kabupaten Demak. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu menemukan suatu permasalahan terkait pembaruan dan pemberlakuan sistem informasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak, sehingga menyebabkan ketidakmaksimalan penyerapan realisasi anggaran pada belanja modal di tahun pertama.

Kata Kunci : Penyerapan, Realisasi Anggaran, SIMDA NG

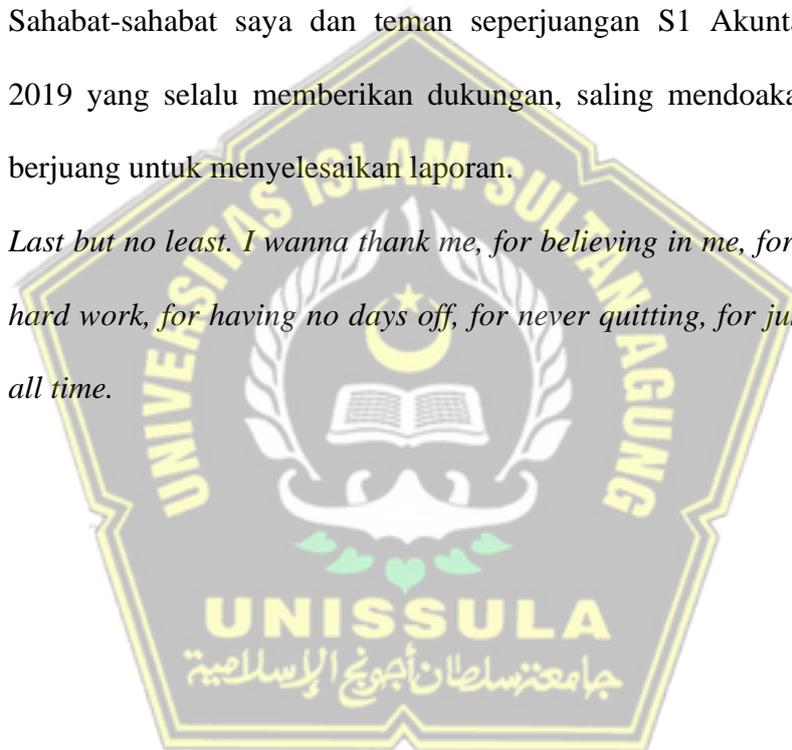
KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan laporan kegiatan magang dengan judul **“Analisis Penyerapan Realisasi Anggaran Setelah Penerapan SIMDA NG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak”** dengan baik. Laporan kegiatan magang ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyusunan laporan kegiatan magang ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang telah memberi bantuan dan arahan yang sangat bermanfaat. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Heru Sulistyono, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Prof. Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA selaku Kepala Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Naila Najihah., SE., M.Sc selaku Dosen Pembimbing Lapangan dan Ibu Umar Surya Alamtyas., SE., MM selaku Dosen Supervisor yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan sabar serta memberikan saran dalam penulisan Laporan *Bussines Casses Report* ini.
4. Allah SWT yang telah melancarkan semua perjuangan hambanya.

5. Orang tua yang saya hormati dan cintai. Beliau yang selalu mendoakan, mendidik, memberi arahan dan semangat dengan tulus. Terimakasih untuk kasih sayang yang tak pernah terputus, semoga Allah SWT selalu melindungi kedua orang tua saya.
6. Adik saya dan keluarga besar saya yang senantiasa mendoakan dan memotivasi dalam penyusunan laporan *Bussines Casses Report* ini.
7. Sahabat-sahabat saya dan teman seperjuangan S1 Akuntasni angkatan 2019 yang selalu memberikan dukungan, saling mendoakan, dan saling berjuang untuk menyelesaikan laporan.
8. *Last but no least. I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all time.*



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
BUSSINES CASES REPORT MAGANG MBKM	iii
PERNYATAAN LAPORAN MAGANG.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penelitian.....	5
1.3. Sistematika Laporan	5
BAB II.....	8
PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG.....	8
2.1. Profil Organisasi.....	8
2.1.1. Gambaran Umum Organisasi.....	8
2.1.2 Struktur Organisasi	9
2.1.3 Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak.....	9
2.1.4. Telaah Visi dan Misi Lembaga.....	20
2.1.5 Pengguna Sistem Informasi Manajemen Daerah Next Generation (SIMDA NG)	21
2.2. Aktivitas Magang	22

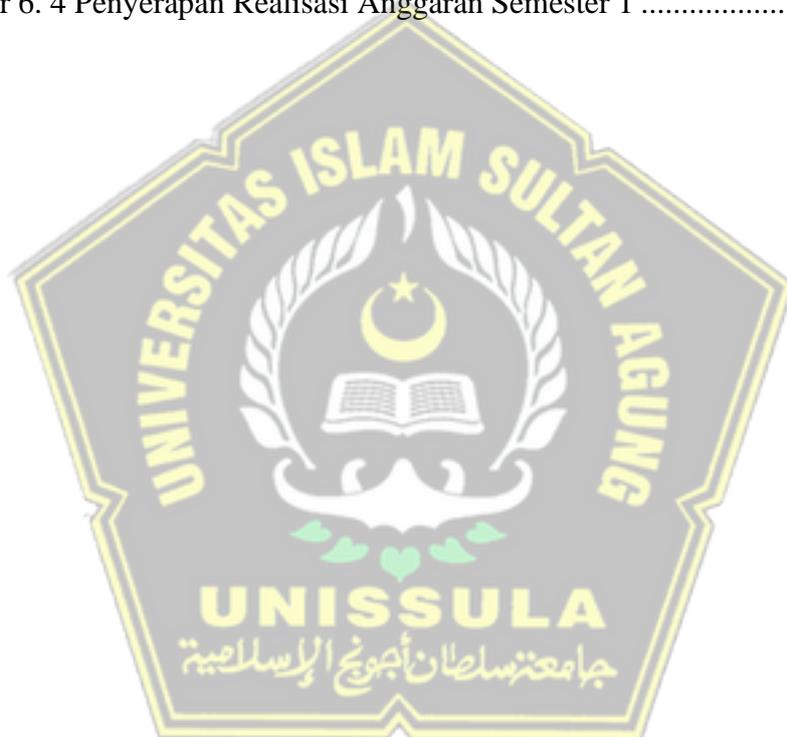
2.2.1. Deskripsi Aktivitas Magang	22
2.2.2. Penjelasan Kegiatan Magang di DINPUTARU.....	23
BAB III	25
IDENTIFIKASI MASALAH.....	25
3.1 Temuan Masalah pada Unit Fungsional.....	25
3.2 Masalah Utama yang diteliti.....	27
BAB IV	29
KAJIAN PUSTAKA.....	29
4.1 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).....	29
4.2 Pembaruan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) menjadi Sistem Informasi Manajemen Daerah <i>Next Generation</i> (SIMDA NG)	31
4.3 Realisasi Anggaran.....	32
4.4 Teori Implementasi Kebijakan	33
4.5 Peran Sistem Informasi Manajemen Daerah <i>Next Generation</i> (SIMDA NG) dalam Penyerapan Realisasi Anggaran	35
BAB V.....	36
METODA PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	36
5.1 Kajian Lapangan.....	36
5.2 Subjek dan Objek Penelitian	37
5.2.1 Subjek Lapangan.....	37
5.2.2 Teknik Penentuan Informan.....	38
5.2.3 Objek Lapangan.....	38
5.3 Sumber Data	38
5.4 Metode Pengumpulan Data	39
5.5 Metode Analisis Data	40
BAB VI.....	42
6.1 Analisis dan Pembahasan	42
6.1.1 Analisis Penyerapan Realisasi Anggaran Pada DINPUTARU Semester 1 Tahun 2022 dengan Penggunaan SIMDA NG	42
6.2 Pembahasan.....	43
6.2.1 Penyerapan Realisasi Anggaran Semester 1 Tahun 2022.....	43

BAB VII.....	50
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	50
7.1 Kesimpulan.....	50
7.2 Rekomendasi	51
BAB VIII.....	53
REFLEKSI DIRI.....	53
DAFTAR PUSTAKA	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi.....	9
Gambar 6. 1 Penyerapan Realisasi Anggaran Semester 1 Tahun 2020	44
Gambar 6. 2 Penyerapan Realisasi Anggaran Semester 1 Tahun 2021	44
Gambar 6. 3 Penyerapan Realisasi Anggaran Semester 1 Tahun 2022	45
Gambar 6. 4 Penyerapan Realisasi Anggaran Semester 1	47



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jam Kerja DINPUTARU Kabupaten Demak	22
Tabel 6. 1 Perbandingan LRA sebelum dan setelah penerapan SIMDA NG pada semester 1	45
Tabel 6. 2 Perbandingan Belanja Modal sebelum dan setelah penerapan SIMDA NG pada semester 1	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Identitas Peserta Magang.....	59
Lampiran 2 : Penilaian Hard Skill oleh DPL, DS, dan DP	60
Lampiran 3: Penilaian Soft Skill oleh Dosen Supervisor.....	61
Lampiran 4 : Daftar hadir peserta magang.....	69
Lampiran 5 : Log Book peserta Magang.....	79
Lampiran 6 : Proses Pembimbing Laporan Magang Oleh DPL	104
Lampiran 7 : Proses Pembimbingan oleh Dosen Supervisor	106
Lampiran 8 : Gagal posting RKA ke DPA pada SIMDA NG	108
Lampiran 9 : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022	110
Lampiran 10 : Laporan Realisasi Anggaran Semester 1 Tahun 2020.....	113
Lampiran 11 : Laporan Realisasi Anggaran Semester 1 Tahun 2021.....	116
Lampiran 12 : Laporan Realisasi Anggaran Semester 1 Tahun 2022.....	120
Lampiran 13 : Surat Permohonan Magang	123



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi Daerah merupakan peluang bagi suatu daerah guna mengembangkan potensi yang ada dan merupakan satu bentuk desentralisasi kebijakan pemerintah yang memiliki tujuan pemberian pelayanan kepada seluruh masyarakat. Pemberian otonomi kepada daerah yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dengan adanya peraturan tersebut, maka daerah memiliki wewenang dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa harus mencatat dan mengelola semua bentuk penerimaan dan pengeluaran daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyerapan realisasi anggaran merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan berhasilnya suatu kebijakan pemerintah. Dengan demikian diperlukannya penyerapan anggaran secara maksimal guna membantu dalam mensejahterakan

masyarakat. Tolak ukur kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa dilihat dari tinggi rendahnya penyerapan anggaran dari SKPD tersebut.

Pengukuran kinerja suatu pemerintahan lebih difokuskan pada kemampuan suatu instansi pemerintahan dalam menyerap realisasi anggaran dengan baik. Adanya penyerapan realisasi anggaran yang rendah atau lambat maka instansi dapat dinilai kurang baik dalam menjalankan rencana yang sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu (Ruddy et al., 2018). Oleh karena itu, penyerapan realisasi anggaran secara maksimal menjadi poin penting dalam mencapai kinerja yang baik dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak mengalami kendala yaitu adanya penurunan penyerapan realisasi anggaran. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DINPUTARU) Kabupaten Demak tahun 2021 di semester 1 mampu merealisasikan anggaran sebesar 43.407.341.787,00 sedangkan pada tahun 2022 di semester 1 hanya mampu merealisasikan anggaran sebesar 10.095.569.107,00. Sistem informasi merupakan salah satu faktor penting yang digunakan sebagai pembantu dalam mempercepat proses pencairan. Pemerintah memiliki kewajiban dalam memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Teknologi informasi perlu dikembangkan pemerintah guna mempermudah pemerintah dalam mengakses, mengelola, dan menggunakan informasi secara tepat, cepat, dan akurat (Eristanti, 2019). Untuk meningkatkan kemampuan mengatur keuangan serta penyaluran atau

distribusi informasi keuangan kepada pelayanan publik baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat maka pemerintah memiliki kewajiban untuk memajukan teknologi informasi.

Melihat adanya beberapa permasalahan yang terjadi didalam masyarakat seperti rusaknya ruas jalan Kabupaten ataupun desa yang segera membutuhkan perbaikan, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak merupakan salah satu instansi pemerintahan yang memiliki peran penting untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Penyerapan anggaran dalam OPD perlu dilakukan secara maksimal agar kebutuhan masyarakatpun bisa terpenuhi dengan baik. Ketika terjadi penurunan atau rendahnya penyerapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan berdampak pada kurang terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini membahas permasalahan terkait dengan perubahan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) menjadi Sistem Informasi Manajemen Daerah *Next Generation* (SIMDA NG) yang berdampak terhadap proses penyerapan realisasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak. SIMDA NG merupakan sistem yang dibuat dan dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam bentuk *website* untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja (Palopo, 2022). Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dikenalkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak pada tahun 2017 berlanjut sampai

tahun 2021 dan diperbarui pada tahun 2022 menjadi Sistem Informasi Manajemen Daerah *Next Generation* (SIMDA NG). Guna mewujudkan pengelolaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan pemerintahan daerah yang baik dan terarah, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menciptakan SIMDA yang dapat di manfaatkan setiap saat (Yanto, 2019).

Dalam implementasinya, Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) memiliki kendala tidak dapat aksesnya sistem tersebut melalui *website* yang akan berdampak ke terbatasnya akses pengguna untuk menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Adanya permasalahan tersebut, pemerintah Daerah mengambil langkah untuk memperbarui Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dengan harapan dapat menyelesaikan kendala yang terjadi. Pembaruan yang dilakukan Pemerintah menjadi Sistem Informasi Manajemen Daerah *Next Generation* (SIMDA NG) memunculkan beberapa kendala karena ketidaksiapannya dan masih harus banyak melakukan penyesuaian yang pada akhirnya akan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan sampai dengan proses realisasi anggaran.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan tersebut menarik untuk diteliti karena melihat adanya perubahan dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) menjadi Sistem Informasi Manajemen Daerah *Next Generation* (SIMDA NG) yang dapat mempengaruhi penyerapan realisasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak..

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana dampak perubahan dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) menjadi Sistem Informasi Manajemen Daerah *Next Generation* (SIMDA NG) dalam mempengaruhi proses penyerapan realisasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DINPUTARU) Kabupaten Demak.

1.3. Sistematika Laporan

Penyusunan laporan magang ini terdiri dari beberapa bab dan sub-bab yang masing-masing menjelaskan hal yang berbeda. Adapun sistematika laporan sebagai berikut :

1.1.1 BAB 1 PENDAHULUAN

Menjelaskan secara umum gambaran magang yang dilakukan, permasalahan, dan tujuan magang, serta menjelaskan mengenai sistematika penyusunan laporan magang.

a. Latar Belakang

Menguraikan alasan dari pemilihan topik yang dipilih berdasarkan permasalahan atau keunikan perusahaan.

b. Tujuan Penelitian

Menjelaskan hal-hal yang akan di uraikan dalam bab analisis.

c. Sistematika Laporan

Menguraikan bab dan sub-bab dalam laporan magang.

1.1.2 **BAB 2 Profil Organisasi dan Aktivitas Magang**

Menguraikan profil organisasi tempat magang dan menjelaskan kegiatan yang dilakukan mahasiswa selama proses magang.

a. **Profil Organisasi**

Apabila diijinkan oleh perusahaan maka akan di masukkan sub-bab profil organisasi tempat magang. Dengan menguraikan profil organisasi yang menjadi konteks dari topik yang dipilih.

i. **Gambaran Umum Organisasi**

Menggambarkan dan mengenalkan organisasi tempat magang.

ii. **Visi dan Misi Organisasi**

Menyebutkan visi dan misi organisasi tempat magang.

iii. **Struktur Organisasi**

Menggambarkan struktur organisasi tempat magang.

b. **Aktivitas Magang**

Menguraikan seluruh aktivitas yang dilakukan selama magang.

1.1.3 **Bab 3 Identifikasi Masalah**

Mengidentifikasi masalah yang muncul dan memilih beberapa masalah yang paling penting untuk dipecahkan.

1.1.4 **Bab 4 Kajian Pustaka**

Menguraikan teori yang dapat digunakan untuk membahas masalah penting yang dipilih.

1.1.5 **Bab 5 Metode Pengumpulan dan Analisis Data**

Pengumpulan data dan informasi dari perusahaan yang berguna untuk mendukung validitas dalam analisis data.

1.1.6 Bab 6 Analisis dan Pembahasan

Menguraikan kembali masalah penting yang menjadi topik pembahasan.

1.1.7 Bab 7 Kesimpulan dan Rekomendasi

Menjelaskan kesimpulan yang dihasilkan dari analisis permasalahan yang ada. Serta memberikan rekomendasi tentang hal-hal yang perlu diperbaiki di organisasi tempat magang terhadap permasalahan yang ada dan program studi terhadap kelemahan kontribusi mahasiswa saat magang.

a. Kesimpulan

Menyimpulkan pendapat tentang masalah yang dianalisis

b. Rekomendasi

Rekomendasi tentang hal-hal yang perlu diperbaiki perusahaan.

1.1.8 Bab 8 Refleksi Diri

Memberikan jabaran tentang hal-hal positif yang diterima selama perkuliahan yang bermanfaat terhadap pekerjaan selama magang. Serta penjabaran tentang manfaat magang terhadap pengembangan *softskill* yang didapatkan.

BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

2.1. Profil Organisasi

2.1.1. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Demak Nomor 59 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak, tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program kerja untuk melaksanakan urusan pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan.
2. Perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum, tata ruang, dan pertanahan.
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
4. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi di bidang pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan;

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak telah dilengkapi dengan perangkat organisasi sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi

2.1.3 Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak

Berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak, uraian tugas

jabatan struktural Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan kewenangan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum, tata ruang, dan pertanahan

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberikan tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Sekretariat membawahi :

1. Subbagian Program dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan administrasi keuangan operasional kerja perangkat daerah

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyiapkan administrasi umum dan kepegawaian serta melaksanakan tata laksana

pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan perangkat daerah.

C. Bidang Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi, yang membawahi:

Bidang Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis, merencanakan, melaksanakan, membina, mengembangkan dan mengendalikan Sumber Daya Air. Bidang Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi membawahi :

1. Seksi Pembangunan dan Sumber Daya Air

Sub Koordinator Pembangunan Sumber Daya Air, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang pembangunan sumber daya air meliputi :

- a. Menyusun rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bangunan, embung dan bangunan penampung air lainnya;
- b. Menyusun rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi air tanah dan air baku;
- c. Menyusun rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendalian banjir, lahan, drainase utama perkotaan dan pengaman pantai;

- d. Melakukan peningkatan jaringan irigasi permukaan, bendung irigasi, irigasi rawa, irigasi tambak, sumur jaringan irigasi air tanah, irigasi air tanah;
- e. Merehabilitasi jaringan irigasi air tanah;
- f. Mengelola dan mengawasi alokasi air irigasi

2. Seksi Operasi, Pemeliharaan dan Pengendalian SDA

Seksi Operasi, Pemeliharaan dan Pengendalian SDA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang operasi, pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air yang meliputi:

- a. Merevitalisasi danau;
- b. Menormalisasi atau merestorasi sungai;
- c. Membangun infrastruktur untuk melindungi mata air;
- d. Melakukan operasi dan pemeliharaan bendungan, embung dan penampung air lainnya;
- e. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan konservasi kawasan rawa;
- f. Melakukan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan, bendung irigasi, jaringan irigasi rawa, jaringan irigasi tambak, sumur jaringan irigasi air tanah, jaringan irigasi air tanah.

3. Seksi Bina Konstruksi

Seksi Bina Konstruksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang bina konstruksi yang meliputi:

- a. Menyiapkan training need assessment (TNA) pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- b. Menyiapkan instruktur atau asesor atau penyelenggara pelatihan;
- c. Menyiapkan SOP penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi melaksanakan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- d. Mengidentifikasi potensi kerjasama dan pemberdayaan jasa konstruksi;
- e. Memfasilitasi sertifikasi tenaga terampil konstruksi;

D. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, melaksanakan penyelenggaraan jalan dan jembatan, membina dan mengendalikan pemanfaatan ruang milik jalan dan jembatan. Bidang Bina Marga, yang membawahi

1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang pembangunan jalan dan jembatan yang meliputi :

- a. Menyusun rencana, kebijakan, dan strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan;
 - b. Melakukan pembebasan lahan atau tanah untuk penyelenggaraan jalan dan jembatan;
 - c. Mengelola leger jalan;
 - d. Melaksanakan pembangunan jalan;
 - e. Melakukan pelebaran jalan ukuran standar, pelebaran jalan menambah lajur;
 - f. Merekonstruksi jalan.
2. Seksi Pengendalian, Pengawasan Jalan dan Jembatan

Seksi Pengendalian, Pengawasan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam melaksanakan pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan pemanfaatan ruang milik jalan dan jembatan yang meliputi:

- a. Melakukan pengawasan teknis penyelenggaraan jalan atau jembatan;
 - b. Melaksanakan penanggulangan dan evaluasi penyelenggaraan jalan atau jembatan;
 - c. Melakukan pengawasan teknis penyelenggaraan jalan atau jembatan.
3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi

dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang operasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang meliputi:

- a. Merehabilitasi jalan;
- b. Melakukan pemeliharaan berkala jalan;
- c. Melakukan pemeliharaan rutin jalan;
- d. Merehabilitasi jembatan;
- e. Melakukan pemeliharaan rutin jembatan;
- f. Melakukan pemeliharaan berkala jembatan;

E. Bidang Cipta Karya, yang membawahi

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengembangkan, mengawasi dan mengendalikan Tata Bangunan, Gedung, Sistem Penyediaan Air Minum, Drainase dan Limbah Domestik.

1. Seksi Tata Bangunan dan Gedung

Seksi Tata Bangunan dan Gedung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang tata bangunan dan Gedung yang meliputi:

- a. Melakukan perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung kabupaten;
- b. Menyusun regulasi terkait bangunan gedung Kabupaten;

- c. Melaksanakan bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara kabupaten;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung negara wilayah kabupaten;
 - e. Melakukan identifikasi, penetapan, penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan milik pemerintah kabupaten;
 - f. Melaksanakan bantuan teknis bagi masyarakat pemilik bangunan gedung cagar budaya yang ditetapkan tingkat kabupaten.
2. Seksi Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
- Seksi Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang meliputi:
- a. Menyusun rencana, kebijakan, strategi, dan teknis Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM);
 - b. Melaksanakan supervisi pembangunan atau peningkatan atau perluasan atau perbaikan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM);
 - c. Melaksanakan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM);
 - d. Membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan dikawasan perkotaan;

- e. Membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan dikawasan pedesaan;
- f. Melakukan perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan dikawasan pedesaan;

3. Seksi Pengelolaan Drainase dan Limbah Domestik.

Seksi Pengelolaan Drainase dan Limbah Domestik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang Pengelolaan Drainase dan Limbah Domestik yang meliputi:

- a. Melakukan supervisi pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan atau perluasan atau sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota;
- b. Melaksanakan pembangunan atau penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota;
- c. Melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik;
- d. Melakukan pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik;
- e. Melakukan pembinaan teknik sistem drainase perkotaan;
- f. Membangun sistem drainase;
- g. Meningkatkan saluran drainase perkotaan;

F. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan yang membawahi:

Bidang Tata Ruang dan Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengembangkan, mengawasi dan mengendalikan pemanfaatan Ruang wilayah, Bangunan dan Pertanahan.

1. Seksi Perencanaan Tata Ruang

Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan tata ruang yang meliputi:

- a. Melaksanakan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RTRW Kabupaten;
- b. Menetapkan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang;
- c. Mensosialisasikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang;
- d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW kabupaten;

2. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melakukan peyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian dan pemanfaatan ruang yang meliputi:

- a. Menyediakan sistem informasi penataan ruang;

- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang;
- c. Mengoperasikan tugas dan fungsi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bidang penataan ruang;

3. Seksi Pertanahan

Seksi Pertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang pertanahan yang meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha;
- b. Menginventarisasi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan dalam satu Kabupaten;
- c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah kabupaten;
- d. Menginventarisasi subjek dan objek redistribusi tanah;

G. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh Kepala UPTD yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan, pemeliharaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan tata ruang.

H. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok Dinas.

2.1.4. Telaah Visi dan Misi Lembaga

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada di Kabupaten Demak serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Bupati yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak pada akhir periode. Isi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kabupaten Demak menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung bangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Demak baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isi-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kabupaten Demak untuk periode 2021-2026 sebagai berikut :

“Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera”

Visi dan Misi Bupati Demak diterjemahkan pada visi pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 menyatakan:

- a. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif, dan berbudaya;

- b. Meningkatkan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang berkualitas, dan berdaya saing;
- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Dari ketiga misi Daerah Kabupaten Demak tersebut maka misi ketiga adalah misi yang diemban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak adalah misi (1) dan (3).

2.1.5 Pengguna Sistem Informasi Manajemen Daerah Next Generation

(SIMDA NG)

Pengguna SIMDA NG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak adalah semua staff DINPUTARU terutama admin bidang (setelah koordinasi dengan kepala seksi dan kepala bidang masing-masing admin), terutama saat penganggaran keuangan murni yang dilakukan di pertengahan sampai akhir tahun untuk menganggarkan detail Rencana Kerja dan Anggaran Murni (RKAM) tahun berikutnya dan detail Rencana Kerja dan Anggaran Pergeseran (RKAP) tahun berjalan saat terdapat pergeseran ataupun perubahan anggaran.

Selain admin bidang sebagaimana dijelaskan sebelumnya, yang menggunakan SIMDA NG adalah staff program dan keuangan, berkaitan dengan proses penganggaran induk dan penatausahaan keuangan yang pada akhirnya menghasilkan laporan keuangan Dinas.

2.2. Aktivitas Magang

2.2.1. Deskripsi Aktivitas Magang

Berikut ini merupakan jadwal kegiatan magang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DINPUTARU) Kabupaten Demak :

- i. Masuk pukul 07.30
- ii. Istirahat pada pukul 12.00 – 13.30 WIB
- iii. Pulang pada pukul 15.30 WIB

Tabel 2. 1 Jam Kerja DINPUTARU Kabupaten Demak

Hari Kerja	Jam Kerja
Senin - Kamis	07.30 – 07.45 WIB (Apel pagi) 07.45 – 12.00 WIB (Masuk) 12.00 – 13.30 WIB (Istirahat) 13.30 – 15.30 WIB (Masuk) 15.30 -WIB (Pulang)
Jumat	07.30 – 07.45 WIB (Apel pagi) 07.45 – 12.00 WIB (Masuk) 12.00 – 13.30 WIB (Istirahat) 13.30 – 15.00 WIB (Masuk) 15.00 -WIB (Pulang)

2.2.2. Penjelasan Kegiatan Magang di DINPUTARU

Selama proses magang, peneliti ditempatkan di bagian sekretariat khususnya bagian Program dan Keuangan. Tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- i. Kegiatan magang diawali dengan apel pagi kemudian dilanjutkan dengan pengenalan jobdesk didalam DINPUTARU khusus dibagian Sekretariat dan perkenalan diri ke staff bagian Sekretariat.
- ii. Dalam satu bulan pertama peneliti mendapatkan tugas yang ditangani oleh sekretariat bagian keuangan tertama tugas mengenai gaji ASN. Tugas menghitung dan merekap jumlah gaji ASN yang dimulai dari adanya tunjangan, potongan pajak, dan potongan-potongan yang lainnya sampai menghasilkan gaji bersih, kemudian peneliti juga di tugaskan dalam merekap para ASN yang dikenakan pengembalian tunjangan anak.
- iii. Bulan kedua peneliti di tugaskan membantu bendahara pengeluaran dalam mencari selisih ketika terjadi ketidakcocokan angka, mencocokkan dan memastikan nominal angka dari data yang sudah ada dengan data yang sudah terinput di dalam sistem.
- iv. Bulan ketiga peneliti dipindah pada bagian pemrograman. Di bagian tersebut peneliti di tugaskan untuk merekap semua kegiatan di tahun 2022 agar sesuai dengan data yang sudah ada. Selain itu peneliti juga membantu dalam mengirimkan surat yang akan dikirimkan ke instansi

tertentu, dan mengikuti rapat sosialisasi yang dilakukan untuk seluruh Dinas yang ada di kabupaten Demak.

- v. Bulan keempat dan kelima peneliti kembali ditempatkan pada bagian keuangan. Peneliti menerima tugas yang semakin beragam, seperti mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), melakukan pengelompokan Ganti Uang (GU) sesuai dengan kegiatan dari masing-masing bidang. Penginputan pengeluaran yang terkena pajak dengan merekap jurnal, ID Billing, serta Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) untuk disetorkan ke Bank Pemerintah Daerah (BPD), mengecek dan mencocokkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari berbagai bidang dengan Ganti Uang (GU) yang sudah dibuat.

Selama lima bulan mengikuti program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak, peneliti mendapat banyak ilmu, pengalaman, dan pengetahuan baru. Peneliti juga bisa mengenal, mempelajari, dan mengoperasikan berbagai macam sistem yang ada. Dengan pengalaman yang luar biasa, dapat menambah kemampuan peneliti untuk menghadapi dunia kerja.

BAB III

IDENTIFIKASI MASALAH

Permasalahan merupakan hal yang sangat wajar terjadi dalam suatu instansi atau lembaga manapun begitu juga dengan Dinas. Permasalahan bisa terjadi dari berbagai macam aspek ataupun kegiatan yang dijalankan, tetapi dengan adanya hal tersebut bisa dijadikan sebagai bahan referensi dan evaluasi guna memperbaiki untuk hal berikutnya. Dalam hal ini peneliti akan memaparkan permasalahan berdasarkan dari hasil yang sudah diperoleh selama magang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak. Peneliti mengidentifikasi masalah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Demak karena adanya urgensi permasalahan di dalam penyerapan realisasi anggaran. Adanya penyerapan realisasi anggaran yang rendah atau lambat maka instansi dapat dinilai kurang baik dalam menjalankan rencana yang sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu (Ruddy et al., 2018)

3.1 Temuan Masalah pada Unit Fungsional

Berdasarkan hasil dari pengamatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatannya. Adapun penjelasan mengenai setiap masalah sebagai berikut :

No	Unit Fungsional	Sumber Masalah
1.	Akuntansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun. 2. Adanya perubahan dan pergeseran anggaran. 3. Belum siapnya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah <i>Next Generation</i> (SIMDA NG) dalam proses penganggaran. 4. Adanya pembaruan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) 5. Keterlambatan pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
2.	Manajemen SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penempatan pegawai yang masih belum sesuai dengan jurusan masing-masing. 2. Kurangnya pegawai dengan jurusan teknik dalam bidang 3. Kurangnya pengawasan dalam proses penginputan data. 4. Pensiun ASN yang tidak diimbangi dengan pengangkatan ASN baru. 5. Masih terdapat pegawai dengan

		<p>jurusan yang tidak sesuai</p> <p>6. Kurangnya ketelitian dalam pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).</p>
--	--	---

3.2 Masalah Utama yang diteliti

Dalam penelitian kali ini membahas mengenai urgensi permasalahan secara spesifik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak yang mengalami kendala terkait dengan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). SIMDA merupakan sistem yang di rancang oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam proses penganggaran dan penatausahaan keuangan. SIMDA sangat berperan dalam proses penyerapan realisasi anggaran sampai dengan pembuatan laporan keuangan, tetapi dengan perubahan fitur yang hampir setiap tahunnya sehingga menyebabkan banyak ketidaksiapan dalam aplikasi tersebut terutama di tahun 2022.

Pembaruan fitur dari SIMDA menjadi *SIMDA Next Generation* (SIMDA NG) / *FMIS* menyebabkan beberapa perubahan yang dimana sistem tersebut masih harus mendapatkan perlakuan khusus untuk mempermudah para pengguna SIMDA dalam menggunakan dan mempercepat proses penginputan. Hal-hal dari SIMDA NG yang masih menjadi permasalahan yaitu belum siapnya aplikasi tersebut dalam proses penganggaran keuangan seperti halnya mengalami gagal posting Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Demak (DINPUTARU) dalam mengalokasikan anggaran berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan hasil posting dari Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengacu pada entryan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) digunakan sebagai dasar pencairan anggaran Dinas, dokumen tersebut mengcover atau megakomodir semua rekening pendapatan dan belanja serta anggaran kas perbulan. Saat DPA tidak menampilkan hal tersebut, maka dapat di kategorikan sebagai gagal posting.

Saat Sistem Informasi Manajemen Daerah *Next Generation* (SIMDA NG) mengalami gagal posting, maka akan berdampak terhadap lambatnya penyerapan realisasi anggaran. Pada dasarnya realisasi anggaran harus bisa di serap secara maksimal dengan menentukan target setiap bulannya. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari penumpukan di akhir tahun dimana akan berakibat tidak terserapnya realisasi anggaran secara baik.

BAB IV

KAJIAN PUSTAKA

4.1 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Aplikasi Sistem Manajemen Daerah (SIMDA) merupakan suatu sistem aplikasi yang di rancang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu organisasi perangkat daerah dalam mengelola penatausahaan keuangan. Menurut (Ariska, n.d.) Sistem Informasi Manajemen Daerah yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan suatu produk teknologi sistem informasi yang digunakan oleh pemerintahan daerah di Indonesia dalam mengelola keuangan daerahnya. SIMDA dirancang dengan memperhatikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sehingga mengharuskan adanya pengendalian terhadap aplikasi yang akan dijadikan sebagai pedoman pemerintah daerah untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah merancang sebuah sistem aplikasi yang digunakan untuk mengolah data penatausahaan keuangan mejadi laporan keuangan yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dimana sistem ini dikembangkan untuk menunjang tercapainya akuntabilitas atau pertanggungjawaban bagi pemerintah baik pada tingkat SKPD maupun SKPKD (Yanto, 2019). Output yang dihasilkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) meliputi:

1. Penganggaran
 - a. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
 - b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2. Penatausahaan
 - a. Surat Penyediaan Dana (SPD)
 - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
 - c. Surat Perintah Membayar (SPM)
 - d. Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
 - e. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - f. Surat Tanda Setoran (STS)
 - g. Register Penatausahaan
3. Akuntansi dan Pelaporan
 - a. Jurnal
 - b. Buku Besar
 - c. Buku Pembantu
 - d. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - e. Laporan Operasional
 - f. Laporan Arus Kas
 - g. Neraca

Menurut (Yanto, 2019) tujuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merancang dan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai tempat pertukaran informasi pada masing-masing unit kerja dengan penerima koneksi jaringan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
- b. Sebagai media kontrol baik pencapaian fisik untuk realisasi kegiatan dan penyerapan dana.
- c. Sebagai sarana pelaksanaan *good government*.

4.2 Pembaruan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) menjadi Sistem Informasi Manajemen Daerah *Next Generation* (SIMDA NG)

Dalam upaya pengembangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan perubahan SIMDA menjadi sistem SIMDA NG atau biasa disebut dengan *Financial Information Management System* (FIMS). Sistem Informasi Manajemen Daerah *Next Generation* (SIMDA NG) merupakan pengembangan dari SIMDA dalam bentuk *website* sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan akuntabilitas <https://www.bpkp.go.id/>.

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dikenalkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak pada tahun 2017 berlanjut sampai tahun 2021 dan diperbarui pada tahun 2022 menjadi Sistem Informasi Manajemen Daerah *Next Generation* (SIMDA NG). Guna mewujudkan pengelolaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan pemerintahan daerah yang baik dan terarah, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menciptakan

SIMDA dan memperbarui menjadi sistem berbasis *website* yang dapat di manfaatkan setiap saat (Yanto, 2019).

4.3 Realisasi Anggaran

Menurut (Prasetyo & Nugraheni, 2020) Realisasi anggaran merupakan laporan yang mencakup pendapatan, pengeluaran yang dibuat oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah dilakukan selama periode yang telah ditentukan. Laporan realisasi anggaran berguna untuk menyediakan sebuah informasi untuk memperkirakan sumber daya ekonomi baik yang akan diterima ataupun dikeluarkan dalam mendanai semua kegiatan yang berasal dari pusat maupun dari daerah (Sahroni, 2021). Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang terdiri dari pengguna sumber daya kas yang telah dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam periode tertentu (Prasetyo & Nugraheni, 2020). Laporan Realisasi Anggaran memiliki peran penting bagi para pemangku kepentingan dalam menilai kinerja suatu pemerintahan. Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mencakup dana yang telah di anggarkan sebelumnya, sehingga LRA berfungsi untuk menilai efektivitas dan efisiensi anggaran (Prasetyo & Nugraheni, 2020).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga menyebutkan bahwa :

1. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.
2. Penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.

Untuk mengukur realisasi anggaran keuangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak dapat mengetahui secara langsung dengan aplikasi SIMDA NG, tanpa menggunakan aplikasi lain. Laporan yang disediakan SIMDA NG diperoleh dari hasil entry operator, jika belanja rutin yang di cairkan dengan Ganti Uang (GU) maka mulai proses entri Buku Kas Umum (BKU), pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), pengesahan SPJ dan pada akhirnya tebit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) langsung berpengaruh terhadap laporan realisasi anggaran, hal tersebut juga berlaku untuk belanja yang dicairkan secara Langsung (LS).

4.4 Teori Implementasi Kebijakan

Dalam struktur kebijakan, implementasi kebijakan merupakan tahap penting yang dimana dapat mempengaruhi tingkat berhasil atau tidaknya proses dalam mencapai tujuan tersebut (Mursalim, 2017). Pelaksanaan implementasi kebijakan tidak akan selalu berhasil dengan mudah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Ada beberapa model yang bisa digunakan dalam memahami suatu implementasi kebijakan (Heldan et al., n.d.) seperti yang telah di kemukaan oleh George Edwards, implementasi kebijakan memiliki 4 segi

yang wajib di perhatikan untuk menjadikan sebuah implementasi kebijakan yang efektif, diantaranya yaitu :

1) Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan agar para pelaksana juga mengetahui suatu tujuan yang akan di jalankan. Apabila suatu tujuan kebijakan tidak terarah, maka kemungkinan bisa terjadi intensitas pada suatu kelompok.

2) Sumber Daya

Ketika suatu kebijakan sudah di komunikasikan secara jelas dan terarah, tetapi masih tetap membutuhkan sumberdaya untuk membantu implementasi suatu kebijakan agar berjalan dengan efektif.

3) Disposisi

Menurut (Heldan et al., n.d.) disposisi merupakan sebuah komitmen atau tanggungjawab. Apabila seorang pelaksana memiliki disposisi atau tanggungjawab yang baik, maka ia dapat dipastikan dapat menjalankan suatu kebijakan dengan baik.

4) Struktur Birokrasi

Salah satu aspek struktur terpenting di setiap organisasi yaitu dengan adanya Prosedur Operasi Standar (SOP). SOP menjadi petunjuk bagi para pelaksana dalam bertindak. Apabila struktur organisasi di buat terlalu panjang, maka akan menyebabkan lemahnya pengawasan dan menjadi rumitnya prosedur birokrasi.

Salah satu yang menjadi tolak ukur dalam suatu implementasi kebijakan yaitu terletak pada efektivitas implementasi kebijakan itu sendiri. Apabila suatu implementasi kebijakan bisa dilakukan secara efektif maka dalam penggunaan sistem informasi yang di anjurkan sesuai kebijakan juga akan berjalan dengan baik, sehingga membantu instansi dalam melaksanakan kegiatannya.

4.5 Peran Sistem Informasi Manajemen Daerah *Next Generation* (SIMDA NG) dalam Penyerapan Realisasi Anggaran

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah merancang sebuah sistem aplikasi yang digunakan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Daerah. Perancangan aplikasi tersebut di kembangkan untuk mendukung proses penatausahaan keuangan guna membantu merealisasikan anggaran secara maksimal. Sistem Informasi Manajemen Daerah *Next Generation* (SIMDA NG) berfungsi membantu pemerintah dalam proses pengelolaan, penganggaran, penatausahaan keuangan, dan pelaporan keuangan, sehingga SIMDA NG memiliki efek yang sangat besar dalam membantu merealisasikan anggaran (Berkat et al., 2022). Menurut George C. Edward III penggunaan teori implementasi kebijakan yaitu jika suatu kebijakan mengharuskan penggunaan suatu sistem yang dianggap penting tetapi tidak di persiapkan dengan baik, maka sulit untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu (Mursalim, 2017). Oleh karena itu, jika SIMDA tidak dipersiapkan dengan baik, maka kendala tersebut akan menghambat semua kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga berdampak pada penyerapan realisasi anggaran.

BAB V

METODA PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

5.1 Kajian Lapangan

Berdasarkan hasil yang akan di peroleh, maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Hal ini disebabkan karena data diperoleh langsung dalam bentuk opini atau tanggapan narasumber terkait dengan penelitian ini. Menurut (Zaluchu, 2020) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dalam memahami sebuah fenomena tanpa melibatkan hubungan antar variabel. Sedangkan (Syahrudin, 2022) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis suatu data baik secara lisan ataupun tindakan. Oleh karena itu, penelitian kualitatif lebih membahas dan menekankan terhadap kualitas dari sebuah informasi yang bisa dilakukan dengan salah satu cara yaitu wawancara terhadap narasumber.

Penelitian ini lebih difokuskan terhadap pengelolaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak. Fokus dari penelitian ini yaitu membuat suatu kesimpulan mengenai pembaruan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam membantu proses penyerapan realisasi anggaran. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mencari kesimpulan dalam menilai adanya pembaruan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) menjadi Sistem

Informasi Manajemen Daerah Next Generation (SIMDA NG) terhadap penyerapan realisasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DINPUTARU) Kabupaten Demak.

5.2 Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian kualitatif ini tidak adanya perhitungan data yang diperoleh dengan penggunaan statistik, dikarenakan pada penelitian ini hanya bertujuan untuk mengeksplorasi atau menggali secara mendalam mengenai fenomena yang akan di teliti dan penelitian ini tidak bertujuan untuk menggeneralisasi.

Objek penelitian merupakan topik permasalahan yang akan di kaji atau suatu permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Objek utama dalam penelitian ini yaitu terjadinya pembaruan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) menjadi Sistem Informasi Manajemen Daerah Next Generation (SIMDA NG) terhadap penyerapan realisasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DINPUTARU) Kabupaten Demak.

5.2.1 Subjek Lapangan

Subjek penelitian merupakan narasumber, yaitu seseorang yang memberikan informasi maupun data riset untuk penelitian dan apa yang menjadi sumber informasi dalam penelitian. Adapun subjek dari penelitian ini merupakan Supervisor dalam proses magang MBKM, yaitu Plt. Ka.Sub.Bag Program dan Keuangan. selain itu, di dukung juga dengan narasumber lainnya seperti para staff pada Bagian Program dan Keuangan.

5.2.2 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling merupakan suatu sampel dengan mempertimbangkan dan memilih suatu kriteria dengan maksud tertentu terhadap sampel yang akan diteliti (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini yaitu memperoleh suatu data dari narasumber yang dianggap memiliki kekuatan di bidang program dan keuangan sehingga memudahkan peneliti dalam mengetahui situasi yang akan terjadi.

5.2.3 Objek Lapangan

Objek dari penelitian ini yaitu menjelaskan mengenai kondisi sosial yang berhubungan dengan suatu tempat, pelaku, dan kegiatan yang saling berhubungan yaitu penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah *Next Generation* (SIMDANG) dalam membantu proses penyerapan realisasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DINPUTARU) Kabupaten Demak.

5.3 Sumber Data

Sumber data merupakan suatu hal yang dapat memberikan penjelasan atau informasi yang dilakukan oleh peneliti dalam pengambilan keputusan (Ramlah B, 2013). Analisis pada penelitian ini yaitu didasarkan pada informasi dengan melakukan wawancara kepada informan atau narasumber untuk memperoleh suatu informasi. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari sebuah informasi secara lisan yang diperoleh dari sumber aslinya (Danial, 2015). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber terkait dengan topik yang akan diteliti. Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber yaitu Supervisor di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DINPUTARU) Kabupaten Demak selama kegiatan magang untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh langsung dari suatu instansi atau perusahaan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data mengenai penyerapan realisasi anggaran dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Data inilah yang akan digunakan untuk membandingkan antara realisasi anggaran di semester 1 tahun 2022 dengan realisasi anggaran pada periode tersebut di tahun-tahun sebelumnya.

5.4 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden untuk memperoleh informasi yang

lebih terinci (Alhamid & Anufia, 2019). Wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara yang bebas menanyakan apa saja dengan membawa sejumlah pertanyaan lengkap tetapi tetap mengikuti pedoman yang sudah di tentukan.

2. Dokumentasi

Menurut (Renoat & Latupeirissa, 2019) dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang merujuk pada objek penelitian dengan adanya dokumen-dokumen resmi, surat-surat resmi, peraturan perundang-undangan, ataupun buku laporan lainnya yang bertujuan dengan penelitian.

5.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berfungsi memberikan sebuah gambaran mengenai persoalan untuk menjawab suatu fenomena yang terjadi (Dewi, 2022). Analisis data deskriptif kualitatif dalam penelitian ini yaitu penggunaan data yang diperoleh langsung dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DINPUTARU) Kabupaten Demak dengan tahapan analisis sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan informasi terkait fokus penelitian dengan melakukan sebuah wawancara serta dokumentasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DINPUTARU) Kabupaten Demak mengenai

penggunaan suatu sistem dalam mempengaruhi penyerapan realisasi anggaran.

2. Mengidentifikasi serta menganalisis problem secara lengkap mengenai terjadinya penurunan penyerapan realisasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DINPUTARU) Kabupaten Demak.
3. Membuat sistematika anggaran dengan melihat kebutuhan yang diperlukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DINPUTARU) Kabupaten Demak.
4. Memberikan masukan atas pembuatan sistematika anggaran agar lebih fokus sesuai kebutuhan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DINPUTARU) Kabupaten Demak.



BAB VI

6.1 Analisis dan Pembahasan

6.1.1 Analisis Penyerapan Realisasi Anggaran Pada DINPUTARU Semester 1 Tahun 2022 dengan Penggunaan SIMDA NG

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak diharuskan mampu dalam merealisasikan penyerapan realisasi anggaran secara maksimal. Salah satu tahapan dalam proses laporan realisasi anggaran yaitu dengan diberlakukannya penerapan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah *Next Generation* (SIMDA NG) sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 dan Nomor 77 Tahun 2020.

Proses awal diberlakukannya penggunaan sistem informasi tersebut, terdapat beberapa kendala yang dihasilkan, seperti halnya tidak bisa memproses Rencana Kerja Anggaran (RKA) menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), proses entri yang harus mengikuti aktivitas pada RKA sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama, dan lain sebagainya. Hal tersebut berdampak terhadap proses capaian penyerapan anggaran khususnya pada belanja modal yang tidak bisa terserap secara maksimal. Pada tahun 2020 hingga tahun 2021 di semester 1 dinas mampu merealisasikan belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, serta belanja modal jalan, irigasi dan jaringan. Sampai di tahun 2022 pada semester 1 dinas tidak bisa merealisasikan pada belanja modal tersebut.

Berkaitan dengan diberlakukannya penerapan SIMDA NG pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang memiliki dampak terhadap Penyerapan Realisasi Anggaran, maka dapat dibuktikan hasil wawancara dengan Ibu Umar Surya Alamtyas selaku Plt. Ka.Sub.Bag Program dan Keuangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak sebagai berikut:

“ Sistem Informasi Manajemen Daerah Next Generation (SIMDA NG) mulai diberlakukan di tahun 2022, hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk lebih memudahkan para pemangku kepentingan dan para pekerja dalam mengakses kegiatan. SIMDA NG ini juga lebih transparan dikarenakan sudah dipebarui berbasis website. Tetapi setelah di praktikan, ternyata sistem ini tidak bisa berjalan dengan baik, dan masih belum siap dalam proses penganggaran sehingga membutuhkan banyak perbaikan. Ketika sistem informasi yang digunakan masih seperti ini, maka bisa berdampak terhadap penyerapan realisasi anggaran pada semester 1, dikarenakan sistem informasi menghambat para bidang dalam proses pencairan”

6.2 Pembahasan

6.2.1 Penyerapan Realisasi Anggaran Semester 1 Tahun 2022

Penyerapan realisasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak (DINPUTARU) mengalami penurunan pada semester 1 tahun 2022. Salah satu faktor terjadinya penurunan yaitu diberlakukannya penggunaan SIMDA NG pada tahun 2022. Terdapat beberapa dampak akibat dari penerapan SIMDA NG yaitu pada belanja modal di tahun 2022, sebagaimana

dijelaskan dalam data perbandingan belanja modal sebelum penggunaan SIMDA NG di tahun 2020 hingga tahun 2021 dan setelah penggunaan SIMDA NG di tahun 2022, sebagaimana dijelaskan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tabel 6.2 sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2020 DAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
Bidang Pemerintahan : 1.03		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Unit Organisasi : 1.03.01		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
4	PENDAPATAN - LRA	29.596.875,00	4.700.000,00	15,88	27.500.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	29.596.875,00	4.700.000,00	15,88	27.500.000,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	29.596.875,00	4.700.000,00	15,88	27.500.000,00
5	BELANJA	201.860.532.453,00	29.549.599.454,00	14,64	307.626.459.753,00
5.1	BELANJA OPERASI	92.173.978.853,00	26.545.760.454,00	28,80	56.496.639.531,00
5.1.1	Belanja Pegawai	18.763.616.453,00	7.541.415.097,00	40,19	16.772.824.058,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	73.415.362.400,00	19.004.345.357,00	25,89	39.723.815.473,00
5.2	BELANJA MODAL	109.686.553.600,00	3.003.839.000,00	2,74	251.129.820.222,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.185.648.500,00	0,00	0,00	861.254.750,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.657.489.000,00	778.728.000,00	29,30	783.705.000,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.000.000.000,00	180.017.200,00	0,75	112.045.780.750,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	81.838.416.100,00	2.045.093.800,00	2,50	137.439.079.722,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(201.830.935.578,00)	(29.544.899.454,00)	14,64	(307.598.959.753,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(201.830.935.578,00)	(29.544.899.454,00)	14,64	(307.598.959.753,00)

Gambar 6.1 Penyerapan Realisasi Anggaran Semester 1 Tahun 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
Bidang Pemerintahan : 1.03		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Unit Organisasi : 1.03.01		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
4	PENDAPATAN DAERAH	52.000.000,00	9.700.000,00	18,65	30.000.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	52.000.000,00	9.700.000,00	18,65	30.000.000,00
4.1.2	Retribusi Daerah	52.000.000,00	9.700.000,00	18,65	30.000.000,00
5	BELANJA DAERAH	250.415.575.852,00	43.417.041.787,00	17,34	218.019.433.946,00
5.1	BELANJA OPERASI	107.319.414.967,00	25.936.885.293,00	24,17	88.682.376.646,00
5.1.1	Belanja Pegawai	17.030.588.800,00	7.530.524.458,00	44,22	15.517.369.400,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	76.953.826.167,00	17.220.360.835,00	22,38	73.165.007.246,00
5.1.5	Belanja Hibah	13.335.000.000,00	1.186.000.000,00	8,89	0,00
5.2	BELANJA MODAL	143.096.160.885,00	17.480.156.494,00	12,22	129.337.057.300,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	11.193.573.500,00	0,00	0,00	184.776.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.741.000.000,00	348.288.500,00	20,01	1.405.928.000,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.215.867.496,00	389.505.000,00	0,92	6.564.726.200,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	87.945.719.889,00	16.742.362.994,00	19,04	121.181.627.100,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(250.363.575.852,00)	(43.407.341.787,00)	17,34	(217.989.433.946,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(250.363.575.852,00)	(43.407.341.787,00)	17,34	(217.989.433.946,00)

Gambar 6.2 Penyerapan Realisasi Anggaran Semester 1 Tahun 2021

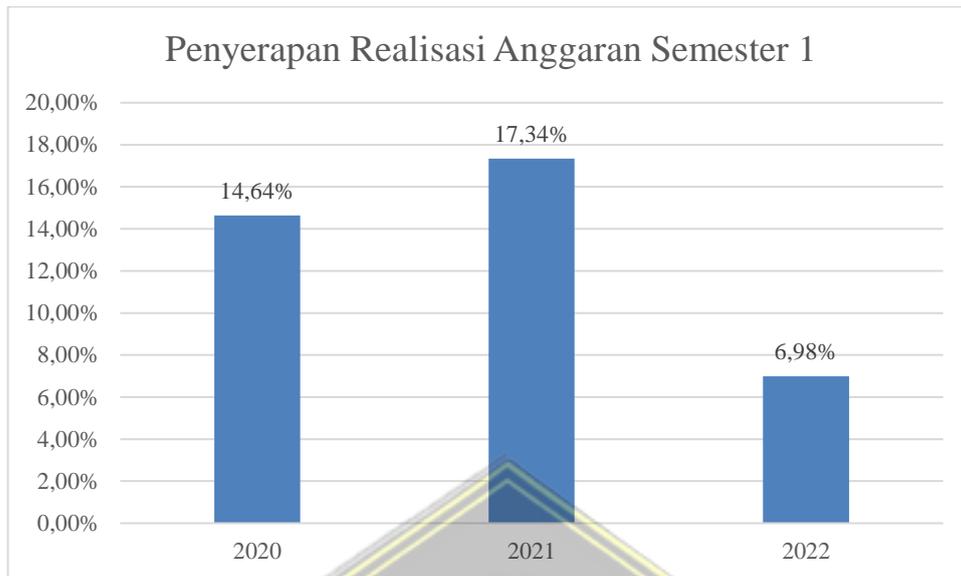
 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Tahun Anggaran 2022 periode 01 Januari 2022 s.d. 30 Juni 2022						
Urusan Pemerintahan : 1-03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Unit Organisasi : 1-03.0-00.0-00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Sub Unit Organisasi : 1-03.0-00.0-00.01.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN DAERAH	53.300.000,00	0,00	13.300.000,00	13.300.000,00	(40.000.000,00)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	53.300.000,00	0,00	13.300.000,00	13.300.000,00	(40.000.000,00)
4.1.02	Retribusi Daerah	53.300.000,00	0,00	13.300.000,00	13.300.000,00	(40.000.000,00)
5	BELANJA DAERAH	144.756.214.576,00	0,00	10.108.869.107,00	10.108.869.107,00	(134.647.345.469,00)
5.1	BELANJA OPERASI	98.568.104.612,00	0,00	10.108.869.107,00	10.108.869.107,00	(88.459.235.505,00)
5.1.01	Belanja Pegawai	16.968.528.576,00	0,00	7.207.474.261,00	7.207.474.261,00	(9.761.054.315,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.202.576.036,00	0,00	2.601.394.846,00	2.601.394.846,00	(63.601.181.190,00)
5.1.05	Belanja Hibah	15.397.000.000,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	(15.097.000.000,00)
5.2	BELANJA MODAL	46.188.109.964,00	0,00	0,00	0,00	(46.188.109.964,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.321.308.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.321.308.000,00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.887.390.964,00	0,00	0,00	0,00	(6.887.390.964,00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	37.979.411.000,00	0,00	0,00	0,00	(37.979.411.000,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(144.702.914.576,00)	0,00	(10.095.569.107,00)	(10.095.569.107,00)	134.607.345.469,00
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(144.702.914.576,00)	0,00	(10.095.569.107,00)	(10.095.569.107,00)	134.607.345.469,00

Gambar 6. 3 Penyerapan Realisasi Anggaran Semester 1 Tahun 2022

Tabel 6. 1 Perbandingan LRA sebelum dan setelah penerapan SIMDA NG pada semester 1

Uraian	Sebelum Penggunaan SIMDA NG		Setelah Penggunaan SIMDA NG
	2020	2021	2022
PENDAPATAN DAERAH	4.700.000,00	9.700.000,00	13.300.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.700.000,00	9.700.000,00	13.300.000,00
Restribusi Daerah	4.700.000,00	9.700.000,00	13.300.000,00
BELANJA DAERAH	29.549.599.545,00	43.417.041.787,00	10.108.869.107,00
BELANJA OPERASI	26.545.760.454,00	25.936.885.293,00	10.108.869.107,00
Belanja Pegawai	7.541.415.097,00	7.530.524.458,00	7.207.474.261,00

Belanja Barang dan jasa	19.004.345.357,00	17.220.360.835,00	2.601.394.846,00
Belanja Hibah	0	1.186.000.000,00	300.000.000,00
BELANJA MODAL	3.003.839.000,00	17.480.156.494,00	0,00
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	778.728.000,00	348.288.500,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	180.017.000,00	389.505.000,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi	2.045.093.800,00	16.742.362.994,00	0,00
Total Pembiayaan	29.544.899.454,00	43.407.341.787,00	10.095.569.107,00



Gambar 6. 4 Penyerapan Realisasi Anggaran Semester 1

Berdasarkan tabel diatas, alokasi pagu anggaran pada semester 1 tahun 2020 sebesar 201.830.935.578,00 dan mampu menyerap sebesar 29.544.899.454,00 dengan persentase 14,64%. Pada semester 1 tahun 2021 alokasi pagu anggaran sebesar 250.363.575.852,00 mampu merealisasikan penyerapan anggaran sebesar 43.407.341.787,00 dengan persentase 17,34%. Berlanjut dengan diberlakukannya penerapan penggunaan SIMDA NG pada semester 1 tahun 2022, alokasi pagu anggaran sebesar 144.702.914.576,00 dinas hanya mampu merealisasikan penyerapan anggaran sebesar 10.095.569.107,00 dengan persentase 6,98%. Adanya hal tersebut, berdampak terhadap Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak. Secara rinci penyerapan Belanja Modal sebagai dampak dari adanya penerapan SIMDA NG pada tahun 2022.

Tabel 6. 2 Perbandingan Belanja Modal sebelum dan setelah penerapan SIMDA NG pada semester 1

Uraian	2020	2021	2022
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	778.728.000,00	348.288.500,00	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	180.017.200,00	389.505.000,00	0
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.045.093.800,00	16.742.362.994,00	0

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2020-2021

Tahun 2020 mampu merealisasikan Belanja Modal peralatan dan mesin sebesar 778.728.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 180.017.200,00, dan Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan sebesar 2.045.093.800,00. Begitu juga di tahun 2021 juga mampu merealisasikan Belanja Modal Peralatan Mesin sebesar 348.288.500,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 389.505.000,00, dan Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan sebesar 16.742.362.994,00. Maka dari itu, Belanja Modal pada semester 1 di tahun 2020-2021 sebelum penggunaan terlaksana dan terserap dengan baik meskipun dari segi realisasi sepenuhnya terealisasikan secara utuh di pertengahan ataupun di akhir tahun.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2022

Pada tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak mengalami penurunan pada Belanja Modal di semester 1. Dinas hanya mampu merealisasikan Belanja Operasi, dimana hal tersebut menjadikan adanya penumpukan pada akhir tahun. Dengan demikian, adanya Penggunaan SIMDA NG ternyata sangat berpengaruh terhadap proses realisasi anggaran pada DINPUTARU. Hal tersebut disa dibuktikan hasil wawancara dengan Ibu Umar Surya Alamtyas selaku Plt. Ka.Sub.Bag Program dan Keuangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak sebagai berikut:

“ Pada tahun 2022 di semester 1 tidak bisa merealisasikan pada belanja modal, hal tersebut disebabkan karena faktor dari penggunaan SIMDA NG. Padahal sebelum diberlakukannya penggunaan SIMDA NG, semua Belanja pada Dinas bisa terserap walaupun pada akhirnya sepenuhnya akan terserap di akhir tahun. Ketika pada semester awal belum bisa merealisasikan dengan baik, sehingga akan terjadi penumpukan di akhir tahun, dan kebutuhan masyarakatpun belum bisa terpenuhi secara maksimal”.

BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah di analisis mengenai penyerapan realisasi anggaran setelah penerapan SIMDA NG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Manajemen Daerah *Next Generation* (SIMDA NG) memiliki peran penting dalam proses penatausahaan keuangan, salah satunya yaitu penyerapan realisasi anggaran pada suatu Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD). Adanya perubahan fitur dari SIMDA menjadi SIMDA NG menyebabkan banyak ketidaksiapan di tahun 2022. Kendala yang dihasilkan dari ketidaksiapan sistem informasi tersebut yaitu terjadinya gagal posting untuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak (DINPUTARU) dalam mengalokasikan anggaran berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan hasil postingan dari Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengacu pada entryan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) digunakan sebagai dasar pencairan anggaran Dinas, dokumen tersebut mengcover atau megakomodir semua rekening pendapatan dan

belanja serta anggaran kas pebulan. Saat DPA tidak menampilkan hal tersebut, maka dapat di kategorikan sebagai gagal posting.

2. Dampak dari kendala tersebut mengakibatkan tidak terealisasi pada Belanja Modal di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak, sehingga menyebabkan penumpukan di akhir tahun dan terjadinya penurunan penyerapan realisasi anggaran di semester 1 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak (DINPUTARU).

7.2 Rekomendasi

Berdasarkan pengkajian masalah yang berkaitan dengan penyerapan realisasi anggaran setelah penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah *Next Generation* (SIMDA NG) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak, maka dapat dijelaskan rekomendasi yang digunakan sebagai alternatif penyelesaian masalah sebagai berikut:

Sebagai dampak dari ketidaksiapan sistem informasi tersebut kepada organisasi pemerintahan, ada beberapa kendala yang dihasilkan seperti adanya gagal posting dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga mengakibatkan penurunan dalam penyerapan realisasi anggaran. Dengan demikian, diperlukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

1. Untuk menghadapi ketidaksiapan sistem informasi tersebut, maka perlu segera mengkoordinasikan kendala-kendala yang dihasilkan dari sistem tersebut kepada Badan Pengelolaan Kekayaan dan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) bagian anggaran mengenai permasalahan yang

berhubungan dengan proses pencairan. Hal tersebut bisa diselesaikan dengan cara menggunakan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) sebagai syarat pencairan sementara, karena bertujuan untuk segera merealisasikan kegiatan yang sudah direncanakan.

2. Saat terjadi kendala terkait Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setelah diposting, Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) segera mengkoordinasikan hal tersebut kepada bagian keuangan untuk segera melakukan perbaikan sistem tersebut.



BAB VIII

REFLEKSI DIRI

Pada kegiatan magang MBKM yang penulis lakukan di Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DINPUTARU) Kabupaten Demak pada tanggal 14 Februari hingga 18 Juni 2022 ini, penulis mendapatkan banyak pengalaman, salah satunya pada bidang akuntansi baik hard skill maupun soft skill. Tugas-tugas yang diberikan ketika magang dapat penulis jadikan pembelajaran yang sangat berharga karena menambah pengetahuan dan melatih keterampilan penulis dalam beberapa aspek. Penulis mendapatkan wawasan praktik kerja melalui permasalahan-permasalahan yang terjadi. Hal ini tentu bisa menambah ilmu penulis dalam mencari solusi atau *problem solving* dalam dunia kerja.

Keterlibatan penulis dalam proses penyerapan realisasi anggaran juga menambah pengetahuan mengenai bagaimana cara untuk bisa memproses pencairan dengan tepat waktu dimana hal tersebut berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Ilmu yang didapatkan pada perkuliahan juga membantu penulis dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan selama magang pada instansi. Pengalaman magang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DINPUTARU) Kabupaten Demak memberikan pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis. Dapatnya penambahan keterampilan soft skill hingga dapat mempelajari berbagai hal yang sebelumnya belum pernah penulis dapatkan. Hal tersebut bisa menjadikan penulis mengembangkan diri dengan adanya ilmu baru yang telah didapatkan pada praktik kerja.

Pengalaman magang ini menjadikan penulis dapat menemukan kekurangan dan kelebihan dalam diri seperti halnya kurangnya ketelitian dalam penginputan data, pencairan selisih dan lain-lain. Dengan kekurangan tersebut akan dijadikan evaluasi bagi penulis untuk bisa jauh lebih baik lagi terutama saat menghadapi dunia kerja. Poin penting yang sudah penulis temukan yaitu mengenai kemampuan dalam mengatasi masalah, bekerja sama dengan baik, dan bagaimana cara manajemen waktu dengan sebaik mungkin. Hal tersebut sangat penting dipelajari karena berpengaruh besar terhadap keberhasilan di dunia pekerjaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Apryana Eristanti, B. D., & I Nyoman Nugraha Ardana Putra. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 91–104. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v1i2.7>
- Ariska, Y. I. (n.d.). Analisis Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu). 12(12), 51–63.
- Berkat, J., Jaya, I., & Halawa, O. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. 1(1), 77–88.
- Birokrasi, S. (2021). *Jurnal governance*. 1(2), 1–8.
- Damayanti, S. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. *Ikraith-Ekonomika*, 5(1), 169–176.
- Danial, E. (2015). Metode Dokumentasi. *Universitas Pendidikan Indonesia*, 127.
- Dewi, E. A. (2022). Perkembangan Penelitian Karakteristik Anggaran Terhadap Kinerja Manjerial Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(1), 71–84. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i1.12569>
- Dewi, N. C. (n.d.). Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan Pada Pemerintahan Kota Pariaman Novia Citra Dewi.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Eristanti. (2019). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Fahzura, L. (2022). *Journal of Social and Policy Issues Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat. 1.*
- Heldan, A., Malik, M., & Pratito, M. A. (n.d.). Efektivitas Implementasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Kasus Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Metro)) Elip Heldan, Malik Malik, Muhammad Ario Pratito.

- Informasi, T., Kinerja, T., Pada, A., Sam, U., Manado, R., & Ratulangi, U. S. (2018). *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.19 No.3 (2018)*. 19(3), 67–85.
- Kusnadi, A., Afriliana, N., Informatika, P. S., Nusantara, U. M., Budaya, S., Alam, S. D., & Tangerang, K. (2019). *Implementasi sistem informasi pembangunan daerah di kabupaten tangerang*. 2.
- Mursalim, S. W. (2017). *Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Bandung Siti Widharetno Mursalim*. 14, 126–138.
- Nasution, M. I., & M.Si, N. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Palopo, U. M. (2022). *Implementasi Sistem Informasi Managemen Keuangan Daerah (simda) Terhadap Kualitas*. 8, 50–56.
- Pelamonia, J. T. (2021). ... , Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Etepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Empiris Di Pemerintah *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(06), 39–52. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/397>
- Prasetyo, W. H., & Nugraheni, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015 – 2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11, 1–10.
- Provinsi, P. B., & Utara, S. (n.d.). *No Title*. 1(13), 202–212.
- Purwaningsih, R., & Kusuma Damar, P. (2015). Analisis faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja usaha kecil dan menengah (ukm) dengan metode structural equation modelling (studi kasus UKM berbasis industri kreatif Kota Semarang). *Prosiding SNST Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang*, 6(1), 7–12.
- Rachmawi, S., Rini, R., & Fitri, Y. (2016). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Akuntabilitas*, 9(1), 143–160. <https://doi.org/10.15408/akt.v9i1.3589>
- Rahmawati, R., Amir, A., & Junaidi, J. (2021). Evaluasi Perencanaan Anggaran Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Dengan Komitmen Manajemen Sebagai Pemoderasi Pada Satuan Kerja

Kementerian Agama Republik Indonesia Di Kota Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(1), 191–208. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i1.11826>

Renoat, R. E., & Latupeirissa, D. S. (2019). Pengaruh Variabel Perencanaan Anggaran, Administrasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran. *PoLiteknik Negeri Kupang*, 18(2), 23–32.

Riani, D., Agung, G., Putri, A., Agus, P., & Pratama, E. (2021). E-Readiness Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Menggunakan Metode Technology Acceptance Model (TAM) (Studi Kasus Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar). *Jurnal Ilmiah Teknologi Dan Komputer*, 2(3), 1–12.

Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin*. 17(33), 81–95.

Sahroni, T. (2021). Analisis Efektivitas Anggaran pada Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2017 – 2019. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 1(1), 36–44.

Saputra, Y., & Ariani, N. E. (2018). *Pengaruh Kompleksitas, Kemandirian dan Opini Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*.

Sari, D. C., Rosidi, -, & Roekhudin, -. (2016). Determinan Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan SKPD. *Journal of Research and Applications: Accounting and Management*, 2(1), 17. <https://doi.org/10.18382/jraam.v2i1.69>

Srimindarti, C. (2008). Ketepatan Waktu Pelaporan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 14–21.

Sugiyono. (2017). *Teknik Purposive Sampling*.

Syahrudin. (2022). *Analisis Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Pada Satker Lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima Dan Kota Bima*. 8(2), 1309–1323. <https://doi.org/10.36312/jime.v8i2.2979/http>

Syahsudarmi, S. (2018). Pengaruh Aspek Keuangan Dan Modal Manusia Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus: UMKM di Wilayah Kota Pekanbaru). *Eko Dan Bisnis (Riau Economics and Business Reviewe)*, 9(1), 66–74.

Thalha, A. (2019). *Instrumen Pengumpulan Data Kualitatif*.

- Wahyu Rahmantika, M., Widarjo, W., & Payamta. (2019). Jurnal Akuntansi dan Bisnis. *Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Pemoderasi*, 19(February 2019), 54–65.
- Yang, A. F., Penyerapan, M., Badan, P., Dan, K., Pemerintahan, D., Manajemen, J., & Ekonomi, F. (2022). *Analysis Of Factors Aff E Cting Budg E T Absorption In Th E Civil Service And Jurnal Emba Vol . 10 , No . 1 Januari 2022 , Hal . 1409-1420*. 10(1), 1409–1420.
- Yanto, E. (2019). *Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA KEUANGAN)*. 3(1).
- Zaluchu, S. E. (2020). Strategi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama. *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat*, 4(1), 28. <https://doi.org/10.46445/ejti.v4i1.167>

